OPTIMALISASI POTENSI PEREKONOMIAN HASIL PERTANIAN MELALUI STRATEGI PENGEMBANGAN TENAGA KERJA DESA BANJARSARI GRESIK

I Made Bagus Dwiarta¹, Crhistina Menuk Sri Handajani², Taudlikhul Afkar³,
Djoko Adi Walujo⁴, Nashrudin Latif⁵

Fakultas Ekonomi^{1,2,3,4,5}

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya^{1,2,3,4,5}

Corresponding author¹ bagusdwiarta@gmail.com

Abstrak : Potensi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dilihat dari segi ekonomi lebih cenderung pada sektor pertanian, meskipun juga terdapat tambak, kolam budidaya, serta kebun buah-buahan. Namun masyarakat Desa Banjarsari dalam perputaran perekonomiannya lebih banyak pada pertanian. Permasalahan yang ada seperti kurangnya pendidikan serta kebutuhan keluarga karena menggantungkan hidupnya dari pertanian. Maka dalam pengabdian ini dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan melalui penyuluhan mengenai strategi pengembangan tenaga kerja untuk meningkatkan perekonomian dari hasil pertanian. Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa melalui rancangan muatan (*content area*) pada penguatan kapasitas individu petani sekaligus penguatan kapasitas kelembagaan dapat mendorong pengembangan petani untuk sinergi dalam usaha peningkatan perekonomian desa pada umumnya dan taraf hidup petani pada khususnya.

Kata kunci : potensi perekonomian, pertanian, tenaga kerja

1. PENDAHULUAN

Segi perekonomian masyarakat Desa Banjarsari hampir seluruh warganya menggantungkan hidupnya dari faktor pertanian baik pertanian sawah seperti padi tebu dan jagung, hingga pertanian non sawah seperti tambak, kolam budidaya dan kebun buah-buahan. Hasil perikanan merupakan salah satu faktor yang paling mendominasi dimana banyak sekali pelaku – pelaku usaha perikanan seperti tambak bandeng dan beberapa kolam budidaya udang vanamei. Segi kesehatan terdapat puskesmas desa yang berada di balai Desa Banjarsari yang orientasinya diperuntukkan bagi masyarakat desa agar lebih sadar akan kesehatan. Selain puskesmas juga terdapat posyandu yang terorganisir cukup baik yang memfokuskan untuk memperhatikan kesehatan bagi ibu dan anak.

Pertanian menjadi primadona yang memiliki peran vital bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS, per November 2018), Nilai Tukar Petani (NTP) berada di angka 103,12 atau 0,09% dibandingkan Oktober. Rata-rata angka NTP tahun 2018 adalah 102,40 atau naik 1,29 % dibandingkan periode 2017. NTP 2018 tercatat terus menanjak dan terbesar selama kurun waktu tiga tahun (2014-2017). Dimana NTP 2014 (102,09), NTP 2015

(101,48), NTP 2016 (101,66) dan NTP 2017 (101,11). Meningkatnya angka NTP menjadi bukti kesejahteraan masyarakat pedesaan yang mayoritas petani meningkat.

Daya beli petani terhadap kebutuhan konsumsi menguat sebab hasil produksi pertanian yang melonjak. Sumbangan terbesar ekspor pertanian berasal dari kakao, cengkeh, serta hasil perkebunan lainnya. Ekspor pertanian Indonesia berdasarkan data BPS per November 2018 sebesar US\$ 320 juta. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan bulan yang sama tahun 2017. Secara rata-rata, ekspor pertanian ikut andil 1,89% total perdagangan dari kumulatif ekspor nonmigas. Sedangkan dari sub sektor perkebunan, tercatat berkontribusi 34% kepada produk domestik bruto (PDB) nasional serta membuka lapangan kerja hingga 22,69 juta jiwa. Pada tri wulan II-2018, subsektor perkebunan menyumbangkan RP 384,22 triliun terhadap PDB.

Merujuk rilis data BPS mengenai ketersediaan beras nasional rata-rata tahun 2018 berjumlah 32,4 juta ton. Stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih berada di angka 2,15 juta ton per 30 November 2018. Jumlah stok yang masih dalam kategori aman tersebut menunjukkan produktivitas pertanian masih aman dan akan memengaruhi stabilitas harga di pasaran. Fakta yang menguatkan bahwa mega sektor pertanian memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian di Indonesia merupakan tulang punggung dari perekonomian dan pembangunan nasional. Peranannya dapat dilihat dalam pembentukan PDB, penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Perannya merambah pada memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Sekaligus peran yang menjadikan sektor pertanian sebagai pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem.

Sektor pertanian memiliki multifungsi yang mencakup aspek produksi atau ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani atau pengentasan kemiskinan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bagi Indonesia, nilai fungsi pertanian tersebut perlu dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan struktur insentif sektor pertanian. Komitmen dukungan insentif melalui pemahaman peran multifungsi perlu didefinisikan secara luas, bukan saja insentif ekonomi (subsidi dan proteksi), tetapi juga dukungan pengembangan sistem dan usaha agribisnis dalam arti luas. Pengembangan lahan pertanian abadi akan diwujudkan jika sektor pertanian dengan nilai multifungsinya dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan.

Urgensi Eksistensi Kelembagaan Petani dalam Pembangunan Pertanian

Pada 2019, koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya terus dijalin untuk mengawal pencapaian target berikutnya program Kementerian Pertanian melalui program Serasi. Komitmen tinggi diharapkan terjalin antara pemerintah pusat (Kementerian Pertanian), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian PUPR terutama Balai Besar Wilayah Sungai (BWSS), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), TNI AD, serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk menyukseskan program Serasi. Dukungan lainnya diperlukan dari

para pedagang pengepul, Persatuan Penggilingan Padi, Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), perusahaan benih, pupuk dan lain-lain juga akan sangat menentukan keberhasilan program Serasi.

Orientasi sinergi pembangunan pertanian di Indonesia tersebut perlu dijawab dengan pengembangan petani melalui kelembagaan pertanian. Pengembangan tenaga kerja melalui kelembagaan petani di pedesaan berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal, infrastruktur, dan pasar, dan adopsi inovasi-inovasi pertanian.

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya pertanian adalah masalah kelembagaan pertanian yang tidak mendukung, salahsatunya kelembagaan petani. Fondasi pemikiran kelembagaan petani pada :

- a. Proses pertanian yang memerlukan sumberdaya manusia tangguh yang didukung infrastruktur, peralatan, kredit dan sebagainya
- b. Pembangunan kelembagaan petani lebih rumit daripada manajemen sumberdaya alam karena faktor produksi dan unit-unit produksi
- c. Kegiatan pertanian mencakup tiga rangkaian : penyiapan input, mengubah input menjadi produk dengan usaha tenaga kerja dan manajemen, dan menempatkan output menjadi berharga
- d. Kegiatan pertanian memerlukan dukungan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan dari pusat hingga lokal
- e. Kompleksitas pertanian, yang meliputi unit-unit usaha dan kelembagaan, sulit mencapai kondisi optimal

Kelembagaan petani adalah lembaga petani yang berada pada kawasan lokalitas (*local institution*), yang berupa organisasi keanggotaan (*membership organization*) atau kerjasama (*cooperatives*) yaitu petani-petani yang tergabung dalam kelompok kerjasama (Uphoff, 1986). Mencakup pengertian organisasi petani, aturan main (*role of the game*).

Peran kelembagaan petani :

- a. Tugas dalam organisasi (*interorganizational task*) untuk memediasi masyarakat dan negara
- b. Tugas sumberdaya (*resource tasks*) mencakup mobilisasi sumberdaya lokal (tenaga kerja, modal, material, informasi) dan pengelolaannya dalam pencapaian tujuan masyarakat
- c. Tugas pelayanan (*service tasks*) mencakup permintaan pelayanan yang menggambarkan tujuan pembangunan atau koordinasi permintaan masyarakat local
- d. Tugas antar organisasi (*extra-organizational tasks*) memerlukan adanya permintaan local terhadap birokrasi atau organisasi luar masyarakat terhadap campur tangan oleh agen-agen luar (Esman dan Uphoff dalam Garkovich, 1989).

Kelembagaan petani yang efektif diharapkan mampu mendukung pembangunan pertanian. Di tingkat petani lembaga diperlukan sebagai : a) wahana untuk pendidikan, b) kegiatan komersial dan organisasi sumberdaya pertanian, c) pengelolaan properti umum, dan membela kepentingan kolektif. Keberadaan kelembagaan petani didasarkan atas kerjasama yang dapat dilakukan oleh petani dalam mengelola sumberdaya pertanian, antara lain : a) pemrosesan, agar lebih cepat, efisien dan murah, b) pemasaran, akan meyakinkan pembeli atas kualitas dan meningkatkan posisi daya tawar petani, c)

pembelian, agar mendapatkan harga lebih murah, d) pemakaian alat-alat pertanian, akan menurunkan biaya atas pembelian alat tersebut, e) kerjasama pelayanan, untuk menyediakan pelayanan kepentingan bersama, f) bank kerjasama, g) kerjasama usaha tani, diperoleh keuntungan lebih tinggi dan keseragaman produk yang dihasilkan, h) kerjasama multi-tujuan, yang dikembangkan sesuai minat yang sama dari petani. Kegiatan bersama (*group action* atau *co-operation*) oleh para petani diyakini oleh Mosher (1991) sebagai faktor pelancar pembangunan pertanian. Aktivitas bersama sangat diperlukan apabila dengan kebersamaan tersebut akan lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Kemandirian Petani Melalui Kelembagaan Petani

Kemandirian (*self reliance*) adalah suatu suasana atau kondisi tertentu yang membuat seorang individu atau sekelompok manusia yang telah mencapai kondisi yang tidak tergantung pada bantuan atau kedermawanan pihak ketiga untuk mengamankan kepentingan individu atau kelompok. (Verhagen, 1996). Kemandirian petani (Soedijanto, 2004) meliputi :

- a. Kemandirian material
- b. Kemandirian intelektual
- c. Kemandirian pembinaan
- d. Sebagai manusia yang interdependensi

Kemandirian dan keswadayaan individu dapat terwujud melalui proses-proses sosial dalam kelembagaan yang ada di masyarakat. Melalui interaksi yang dibangun antar individu dalam masyarakat terjadi proses pembelajaran yang mampu meningkatkan kapasitas individu. Petani yang berdaya adalah petani yang secara politik dapat mengartikulasikan (menyampaikan perwujudan) kepentingannya, secara ekonomi dapat melakukan proses tawar menawar dengan pihak lain dalam kegiatan ekonomi, secara sosial dapat mengelola mengatur komunitas dan mengambil keputusan secara mandiri, dan secara budaya diakui eksistensinya.

Partisipasi petani dalam keputusan-keputusan yang terkait program pembangunan pertanian sangat dibutuhkan oleh sebab :

- a. Informasi penting dalam perencanaan program
- b. Motivasi untuk bekerjasama
- c. Mengambil keputusan
- d. Permasalahan pembangunan pertanian

Pemahaman tentang pemberdayaan petani merupakan suatu strategi yang menitikberatkan pada bagaimana memberikan peran yang proporsional agar petani dapat berperan secara aktif dalam aktivitas sosial kemasyarakatan. Untuk upaya tersebut diperlukan proses pendidikan untuk mengubah sikap petani, dan untuk membangkitkan kegairahan dan hasrat serta kepercayaan akan kemampuan sendiri, dapat meningkatkan kemampuan swadaya (*self help*) perorangan dan kelompok untuk memperbaiki nasib sendiri.

Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani

Pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana yang dimaksudkan sebagai sarana pendorong proses perubahan dan inovasi. Proses transformasi kelembagaan pada petani melalui pembangunan atau pengembangan kelembagaan seyogyanya dapat menjadikan kelembagaan menjadi bagian penting dalam kehidupan petani untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan usaha taninya. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani merupakan perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan, yang menyangkut inovasi-inovasi yang menyiratkan perubahan-perubahan kualitatif dalam norma-norma, dalam pola-pola kelakuan, dalam hubungan-hubungan kelompok, dalam persepsi-persepsi baru mengenai tujuan maupun cara-cara.

Unsur-unsur dalam lembaga (Esman, 1986) dapat dijadikan parameter untuk menilai kapasitas suatu lembaga :

- a. Adanya kepemimpinan
- b. Adanya spesifikasi nilai-nilai, tujuan-tujuan dan metode-metode operasional
- c. Adanya program
- d. Adanya sumberdaya-sumberdaya
- e. Terbentuknya struktur intern

Secara ringkas tujuan kelembagaan kelompok petani tercapai, fungsi dan peran kelembagaan berjalan, adanya keinovatifan kelembagaan dan keberlanjutan kelembagaan sebagai indikator kapasitas kelembagaan (Anantayu, 2009). Berdasarkan kajian Anantayu (2009), langkah-langkah tindakan strategis dalam mengembangkan kelembagaan petani dilakukan dengan cara :

- a. Peningkatan dukungan penyuluhan pertanian
- b. Peningkatan peran pihak luar
- c. Peningkatan kedinamisan kelompok sebagai kelompok pembelajar
- d. Peningkatan kapasitas petani
- e. Peningkatan partisipasi petani dalam kelembagaan

Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dilakukan sejalan dengan kegiatan penyuluhan pertanian dengan memotivasi petani untuk berpartisipasi dalam kelembagaan petani. Penyuluhan pertanian perlu dirancang dengan memberikan muatan pada penguatan kapasitas individu petani sekaligus penguatan kapasitas kelembagaan petani.

2. METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Melihat potensi desa banjarsari yang hampir seluruh warganya menggantungkan hidupnya dari faktor pertanian baik pertanian sawah seperti padi tebu dan jagung, hingga pertanian non sawah seperti tambak, kolam budidaya dan kebun buah-buahan. Maka dalam pengabdian ini dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa banjarsari melalui penjelasan secara deskriptif tentang bagaimana meningkatkan hasil pertanian melalui strategi pengembangan tenaga kerja.

Kegiatan ini dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Peserta yang mengikuti selama kegiatan pengabdian masyarakat ini memang

naik-turun karena melihat berbagai macam latar belakang mereka yang tentunya tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun terlepas dari itu semua, kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Pembangunan Pertanian terhadap Perekonomian Desa Banjarsari

Desa Banjarsari secara geografis terletak di wilayah Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dan secara demografi dihuni oleh penduduk yang memiliki penghasilan dari sektor pertanian. Pertanian sawah seperti padi, tebu, jagung, sedangkan pertanian non sawah seperti tambak, budidaya kolam ikan, dan kebun buah-buahan. Namun sektor perikanan masih mendominasi yaitu tambak bandeng dan kolam budidaya udang *vanamei*. Potensi Desa Banjarsari tersebut sangat memicu peluang perekonomian pedesaan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan visi Desa Banjarsari yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta pemerataan pembangunan di segala bidang. Sedangkan misinya adalah meningkatkan peran serta masyarakat desa Banjarsari dalam mengenali, menganalisis, sekaligus mencari pemecahan terhadap masalah-masalah prioritas pembangunan desa Banjarsari, terutama di bidang fisik prasarana ekonomi, sosial dan budaya.

Keikutsertaan masyarakat dalam capaian prioritas pembangunan Desa Banjarsari perlu digalakkan. Salah satunya dengan keberadaan kelembagaan petani yang sudah menjadi keniscayaan untuk memperbaiki taraf hidup, harkat dan martabatnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) mencatat, nilai tukar petani (NTP) terus mengalami penurunan dalam tiga bulan pertama tahun 2019. Perinciannya Januari 2019 sebesar 103,33, Februari 2019 senilai 102,94, dan Maret 2019 sebesar 102, 73. NTP adalah angka perbandingan antar Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB) dan dinyatakan dalam persentase. Bila angka NTP lebih besar dari 100, maka kondisi petani sedang mengalami surplus. Sedangkan bila kurang dari 100 artinya petani mengalami defisit. Fakta tersebut menunjukkan tantangan dan perlunya solusi, salahsatunya kelembagaan petani yang efektif diharapkan mampu memberi kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kemandirian dan martabat petani.

Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dilakukan sejalan dengan kegiatan penyuluhan pertanian dengan memotivasi petani Desa Banjarsari untuk berpartisipasi dalam kelembagaan petani. Hal ini menjadi perhatian tim Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Kegiatan penyuluhan pertanian dirancang dengan memberikan muatan (*content area*) pada penguatan kapasitas individu petani sekaligus penguatan kapasitas kelembagaan petani dengan harapan dapat mendorong pengembangan petani untuk sinergi dalam usaha peningkatan perekonomian desa pada umumnya dan taraf hidup petani pada khususnya.

4. KESIMPULAN

Penguatan kapasitas individu petani dengan memberikan penyuluhan muatan berdasarkan konten area sekaligus akan memberikan penguatan kepada para petani sekaligus memberikan penguatan secara kelembagaan yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan perekonomian desa secara umum dan peningkatan taraf hidup petani khususnya. Tentunya dengan pemahaman kepemimpinan, spesifikasi nilai-nilai, tujuan, dan metode operasional yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantayu, S. 2009. Partisipasi Petani dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Petani (Kasus di Provinsi Jawa Tengah). Disertasi pada Institut Pertanian Bogor.
- Esman, Milton J. 1986. "Unsur-unsur dari Pembangunan Lembaga" dalam Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional : dari Konsep ke Aplikasi. Editor J.W. Eaton. UI Press. Jakarta. Hal 21-46.
- Garkovich, Lorraine E. 1989. "Local Organizations and Leadership in Community Development" dalam *Community Development in Perspective*. Editor James A. Christenson dan Jerry W. Robinson, Jr. Iowa State University Press. Iowa. Hal. 196-218.
- Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi November 2018, Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/publication/2018/11/06/31bf78988f656dde532a060c/laporan-bulanan-data-sosial-ekonomi-november-2018.html>, diakses tanggal 2 Oktober 2019
- Mosher, Arthur T. 1991. *Getting Agriculture Moving*. Frederick A. Praeger, Inc. Publisher. New York.
- Pemkab Gresik-Desa Banjarsari. https://gresikkab.go.id/sidesa/desa_banjarsari, diakses pada tanggal 1 Oktober 2019
- Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi, Maret 2019, <https://www.bps.go.id/publication/2019/11/01/250160df893e7a871d705501/pengeluaran-untuk-konsumsi-penduduk-indonesia-per-provinsi--maret-2019.html>, diakses tanggal 3 Oktober 2019
- Soedijanto. 2004. Menata Kembali Penyuluhan Pertanian di era Pembangunan Agribisnis. Departemen Pertanian. Jakarta
- Uphoff, Norman Thomas. 1986. *Local Institutional Development : An Analytical Sourcebook With Cases*. Kumarian Press.
- Verhagen, Koenraad. 1996. Pengembangan Keswadayaan : Pengalaman LSM di Tiga Negara. Terjemahan. Puspa Swara. Jakarta.